

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Menurut Wahyuningsih (2018), terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan sebuah situasi dimana sistem keuangan dapat menyalurkan dana dengan efektif, bertahan dari guncangan ekonomi, dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan dua dari sekian banyak kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan (Awanti, 2018).

Stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem perbankan menjadi dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Stabilitasnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat agar dapat disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha (Warjiyo, 2007). Stabilitas sistem keuangan dan stabilitas perbankan memiliki hubungan yang erat, artinya jika sistem perbankan tidak stabil dan mengalami kebangkrutan maka akan mempengaruhi tingkat stabilitas sistem keuangan dan kondisi perekonomian suatu negara.

Jika sistem keuangan suatu negara tidak stabil serta tidak berfungsi secara efisien, maka alokasi dana bisa terhambat sehingga dapat menghambat suatu pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah yang dapat mengganggu

perputaran ekonomi adalah krisis ekonomi global di tahun 2008, dimana mengakibatkan penurunan kinerja ekonomi di banyak negara.

Kondisi kritis keuangan pada tahun 1998 serta 2008, menyebabkan penduduk melakukan penarikan dana dari bank serta lembaga keuangan (*panic withdrawal*). Perkara tersebut disebabkan pemikiran negatif di kalangan masyarakat mengenai situasi tersebut sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan pada badan keuangan (*lack of confidence*). Kondisi seperti ini menjadi pelajaran akan pentingnya mengurangi resiko sistematis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Fauziah *et al.*, 2020). Secara teori faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan yaitu, inflasi, BI rate, ratio kredit macet, dan aliran modal. Ketidakstabilan sistem keuangan terjadi apabila inklusi keuangan mengakibatkan turunnya standar kredit, peningkatan resiko, reputasi bank serta tidak adanya respon regulasi pada keuangan mikro (Dienillah dan Anggraeni, 2020).

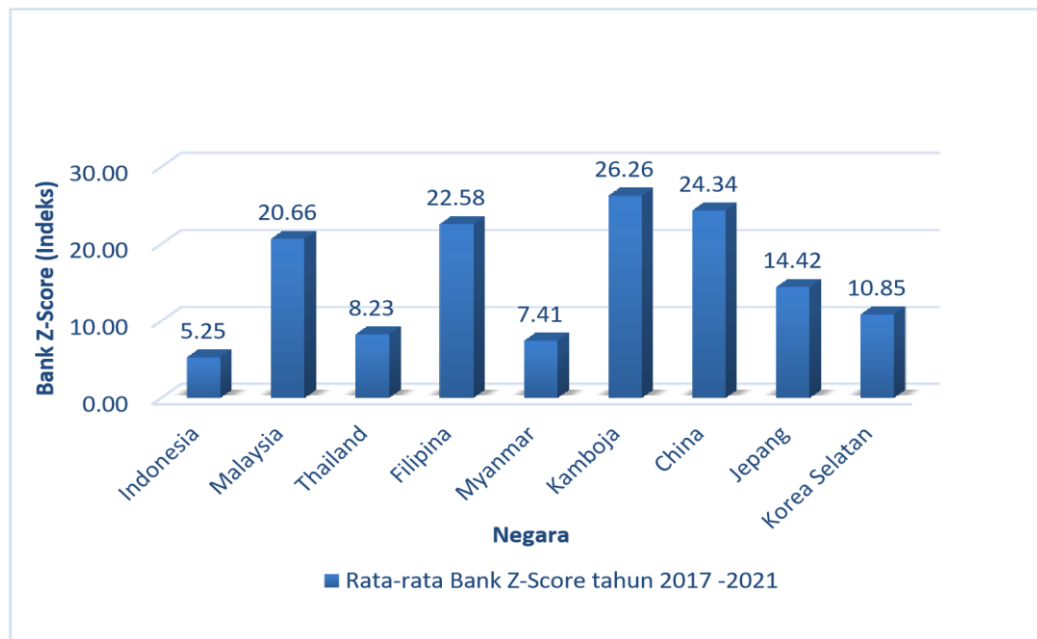
Sejak Krisis Keuangan Global (KKG), baik otoritas pengawas maupun bank komersial telah meningkatkan kembali perhatian terhadap pentingnya risiko bank dan bagaimana risiko diukur. COVID-19 baru-baru ini semakin menimbulkan ketidakpastian terkait risiko dan kinerja bank di masa depan (Goodell, 2020). Bank *z-score* merupakan indikator risiko kebangkrutan bank yang mapan di kalangan akademisi, yang memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan komputasinya.

Prinsip dasar ukuran Bank *z-score* adalah untuk menghubungkan tingkat modal bank dengan variabilitas imbal hasil sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar variabilitas imbal hasil yang dapat diserap oleh modal tanpa membuat bank menjadi bangkrut. Nilai yang lebih tinggi dari Bank *z-score*

menunjukkan risiko yang lebih rendah bagi bank. Tingkat Bank z-score dan ketergantungannya pada data akuntansi menimbulkan potensi tantangan dalam penggunaannya (Bouvatier *et al.*, 2018). Khususnya, Bank z-score standar telah dikritik karena dianggap melihat ke belakang. Hal ini terutama muncul dari penggunaan data akuntansi, yang hanya memperhitungkan kejadian di waktu lampau. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa standar Bank z-score tidak dapat menangkap risiko bank di masa depan.

Konsistensi dengan literatur mengenai stabilitas sistem keuangan, Bank z-score mengukur risiko kebangkrutan yang merepresentasikan stabilitas bank (Yin, 2019). Bank z-score menghubungkan kapitalisasi bank dengan imbal hasil dengan risiko (volatilitas imbal hasil) untuk mengestimasi risiko solvabilitas bank. Secara teoritis, nilai Bank z-score yang lebih besar menggambarkan stabilitas perbankan yang lebih besar. Terdapat banyak studi empiris yang telah menggunakan z-score untuk analisis stabilitas bank.

Bank z-score mengukur profitabilitas yang disesuaikan dengan risiko yang stabil dari sektor perbankan. Fungsi Bank z-score melibatkan pengukuran stabilitas keuangan dan mencerminkan probabilitas kebangkrutan bank. Nilai Bank z-score dimana lebih besar mengimplikasikan probabilitas kebangkrutan yang rendah, makin besar bank z-score, semakin baik kestabilan keuangannya (Berger *et al.*, 2009).



Gambar 1. 1 Indeks Bank z-score di ASEAN+3 tahun 2017-2021

Sumber: *World Bank (2022)*

Pada gambar diatas merupakan data dari Bank z-score seluruh negara di ASEAN+3. Semakin tinggi Bank z-score maka semakin stabil dalam sistem keuangan begitupula dengan penurunan nilai Bank z-score yang berarti menciptakan instabilitas dalam sistem keuangan (Dienillah dan Anggraeni, 2016). Grafik tersebut menampilkan rata-rata Bank Z-Score di negara-negara ASEAN+3 selama periode 2017-2021, memberikan gambaran tentang stabilitas sistem keuangan di setiap negara. Kamboja menonjol dengan nilai bank z-score tertinggi senilai 26,26 menunjukkan bahwa sistem perbankannya relatif stabil dengan risiko kebangkrutan yang rendah. Hal ini bisa dikaitkan dengan regulasi ketat, dukungan pemerintah, serta ukuran ekonominya yang besar dan kuat. Filipina dan Malaysia juga menunjukkan sektor perbankan yang stabil dengan nilai Z-Score masing-masing 22,58 dan 20,66 yang mencerminkan kebijakan moneter yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Sebaliknya, Jepang dan Korea Selatan, meskipun memiliki PDB yang tinggi, menunjukkan nilai bank z-score yang lebih rendah, masing-masing 14,42 dan 10,85. Stabilitas yang lebih rendah ini mungkin disebabkan oleh beberapa tantangan seperti beban utang yang tinggi, populasi yang menua, serta lingkungan suku bunga rendah yang berkepanjangan. Indonesia menampilkan nilai bank z-score terendah (5,25), mengindikasikan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi dalam sistem perbankannya. Faktor-faktor seperti volatilitas ekonomi, tingkat NPL yang tinggi, dan regulasi yang masih berkembang mungkin berkontribusi terhadap skor rendah ini.

Thailand dan Myanmar memiliki nilai bank z-score yang sedang saja, masing-masing 8,23 dan 7,41. Stabilitas perbankan di Thailand mungkin dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor pariwisata dan tantangan politik domestik, sementara di Myanmar, ketidakstabilan politik akibat kudeta militer pada 2021 sangat mempengaruhi stabilitas perbankan. China menampilkan sistem keuangan yang cukup stabil dengan nilai bank z-score 24,34, mungkin karena pertumbuhan ekonomi yang pesat dan investasi asing yang kuat. Variasi dalam nilai bank z-score di antara negara-negara ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi, politik, dan regulasi yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan masing-masing negara.

Menurut Altman (2000) bank z-score dikatakan stabil jika nilainya berada di atas 2.6. Nilai ini menandakan bahwa bank memiliki risiko kebangkrutan yang rendah, karena z-score yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki profitabilitas yang baik, leverage yang rendah, dan ketahanan terhadap volatilitas pendapatan. Sebaliknya, nilai z-score di bawah 1.8 menandakan risiko kebangkrutan yang tinggi, sedangkan nilai antara 1.8 dan 2.6 dianggap berada di

zona abu-abu, yang berarti risiko kebangkrutan sedang. Dapat dikatakan ASEAN+3 memiliki bank z-score yang cenderung stabil dikarenakan nilai dari rata-rata bank z-score berada diatas 2.6.

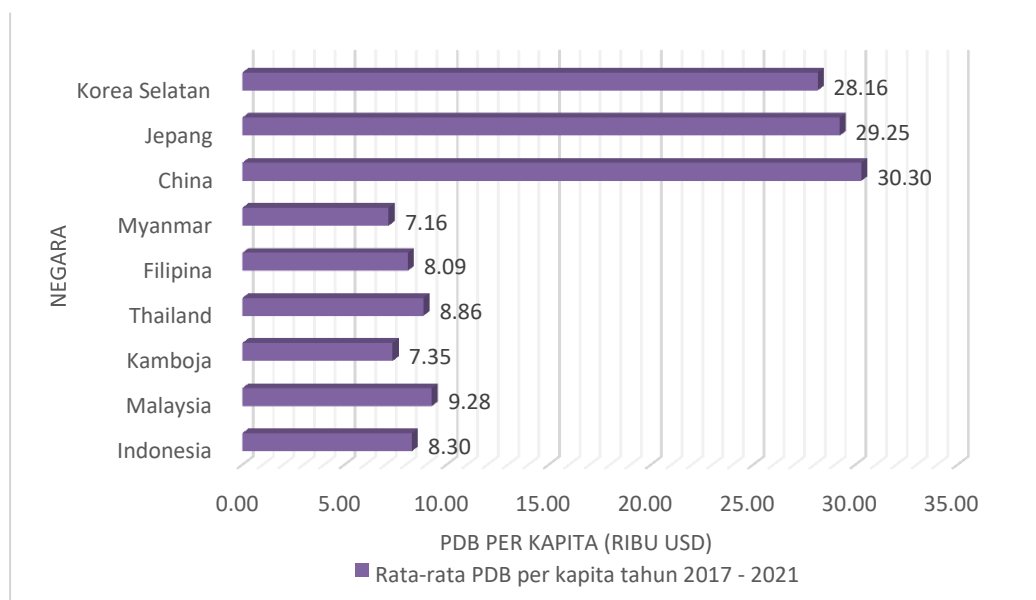
Hubungan kerja sama ASEAN *Plus Three* (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea. Kerja sama APT berdasar *Joint Statement on East Asia Cooperation* mencakup perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, transfer teknologi, teknologi telematika, e-commerce, industri, pertanian, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pengembangan wilayah pertumbuhan, jejaring dunia usaha, dan iptek. Di bidang ekonomi dan moneter mencakup manajemen risiko makro ekonomi, monitoring aliran modal kawasan, memperkuat sistem keuangan dan perbankan, dan reformasi arsitektur keuangan internasional. Beragam kerangka kerjasama antara kedua belah pihak didasari oleh kepentingan yang hendak dikejar oleh kedua belah pihak.

Menurut catatan Swee-Hock (2005), ASEAN membutuhkan kerangka ASEAN+3 melalui kemitraan dengan Cina, Jepang dan Korea guna mengejar sasaran strategis. ASEAN+3 diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih beragam dan lebih besar bagi ASEAN guna mendorong pertumbuhan. Adanya ASEAN+3 dapat mendorong negara anggota ASEAN untuk meningkatkan nilai kompetitifnya melalui reformasi pasar yang lebih besar dan terbuka.

Negara-negara China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki PDB per kapita tertinggi di kawasan ASEAN+3 karena beberapa faktor utama diantaranya, Jepang dan Korea Selatan dikenal karena kemampuan mereka dalam inovasi teknologi dan produksi manufaktur berteknologi tinggi. Industri otomotif, elektronik, dan teknologi informasi menjadi pilar ekonomi kedua negara ini. Ketiga

negara ini memiliki kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan internasional dan investasi asing. Misalnya, Korea Selatan berhasil mengintegrasikan dirinya dalam rantai pasokan global, terutama dalam industri elektronik dan semikonduktor (Batra *et al.*, 2018). Ketiga negara ini telah mengalami pendalaman modal yang signifikan. China, misalnya, telah menerima investasi besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang telah mempercepat pertumbuhan ekonominya. Tingkat tabungan domestik yang tinggi juga mendukung investasi yang berkelanjutan (Zhu, 2021).

Negara China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki PDB per kapita yang tinggi, tetapi penurunan bank z-score di negara-negara ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem perbankan mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kompleks yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan di negara-negara maju tersebut.



Gambar 1.2 PDB perkapita di ASEAN+3 tahun 2017-2021
Sumber: *World Bank* (2022)

Tingginya tingkat utang di ketiga negara ini menjadi salah satu faktor utama. Menurut laporan *Bank for International Settlements* (BIS), rasio utang terhadap PDB di China, Jepang, dan Korea Selatan berada di level yang sangat tinggi. Tingginya tingkat utang ini dapat meningkatkan risiko kredit macet dan mengurangi kemampuan bank untuk menyerap kerugian, yang tercermin dalam penurunan z-score (BIS, 2021)

Selain itu kebijakan moneter yang sangat akomodatif di ketiga negara ini, terutama di Jepang dengan kebijakan suku bunga negatifnya, telah menekan marjin bunga bersih bank-bank. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan kemampuan mereka untuk membangun buffer modal, yang pada gilirannya menurunkan z-score (IMF Global Financial Stability Report, 2020). Penuaan populasi di Jepang dan Korea Selatan membawa tantangan tersendiri bagi sistem perbankan. Menurut studi OECD, penuaan populasi dapat mengurangi permintaan kredit dan meningkatkan risiko kredit, yang berdampak negatif pada kesehatan bank (Koen *et al.*, 2019).

Persaingan yang meningkat dari fintech dan shadow banking, terutama di China, telah mengganggu model bisnis bank tradisional. Laporan Financial Stability Board (FSB) menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat sektor shadow banking di China telah meningkatkan risiko sistemik (FSB, 2022).

Maka dari itu terjadilah, Ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan pandemi COVID-19 telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Menurut Bank of Japan, ini telah meningkatkan risiko pasar yang dihadapi bank-bank, yang dapat menurunkan z-score mereka. Meskipun PDB tinggi, ketiga negara ini menghadapi tantangan struktural. China menghadapi transisi dari ekonomi berbasis ekspor ke ekonomi berbasis konsumsi, Jepang

berjuang dengan deflasi dan pertumbuhan yang stagnan, sementara Korea Selatan menghadapi ketidakseimbangan dalam struktur ekonominya. Menurut World Bank, tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi kualitas aset bank dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun memiliki PDB yang tinggi, kompleksitas faktor-faktor ini menjelaskan mengapa bank z-score di China, Jepang, dan Korea Selatan mengalami penurunan, menunjukkan bahwa PDB yang tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030, akan tetapi menurut Bank Dunia saat ini terdapat 400 juta orang dari 1,4 miliar penduduk ASEAN yang tidak memiliki rekening bank. Hal ini dikarenakan tidak meratanya akses antara pedesaan dan perkotaan, kesenjangan pendapatan dan akses ke layanan keuangan. Seperti yang terdapat dalam situs Bank Indonesia bahwa negara–negara di ASEAN berkomitmen untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2025. Salah satu program yang akan dilaksanakan implementasi rencana aksi strategis dalam rangka menciptakan sektor keuangan kawasan yang stabil, terintegrasi, dan inklusif (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020).

Stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan terintegrasi, memastikan stabilitas sistem keuangan memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Salah satu komponen kunci dalam mencapai stabilitas ini adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan tidak hanya tentang menyediakan akses ke layanan perbankan bagi

semua lapisan masyarakat, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai guncangan (Hannig & Jansen, 2011).

Sejak tahun 2000-an konsep inklusi keuangan telah mendapat perhatian dari banyak negara di dunia, karena menurut Guriras dan Ministers (2010), dalam penelitiannya mengatakan bahwa upaya inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di sebuah negara. Inklusi keuangan adalah upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga dan non-harga (Bank Indonesia, 2014)

Terlepas dari pesatnya implementasi program inklusi keuangan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan di negara-negara ASEAN. Sebab inklusi keuangan dapat menaikkan pembagian indikator perbankan serta kestabilan basis simpanan, inklusi keuangan positif pada kestabilan sistem keuangan. Akan tetapi, inklusi keuangan juga berdampak negatif karena badan keuangan mencoba menggapai masyarakat kelas rendah yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan menurunkan persyaratan pinjaman, yang meningkatkan risiko (Khan, 2011).

Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting di tingkat nasional maupun internasional, dikarenakan terdapat 2,6 milyar orang atau lebih dari 50 persen penduduk dunia yang tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan. Agenda inklusi keuangan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan inklusif di berbagai negara (Khan, 2011). Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya inklusi keuangan dapat meningkatkan basis tabungan serta meningkatkan pembiayaan bagi masyarakat yang dapat memperlancar fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan kinerja di sektor rill. Dampak dari hal tersebut

dapat mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan pemasukan, serta kestabilan sistem keuangan yang dapat menghasilkan perkembangan yang merata untuk semua masyarakat.

Pada forum internasional seperti *Group of Twenty (G20)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sudah mempertimbangkan inklusi keuangan sebagai agenda global. Penerapannya sudah dilakukan oleh berbagai negara baik negara berpendapatan tinggi (*High Income Countries*), menengah atas (*Upper Middle Income Countries*), menengah bawah (*Lower Middle Income Countries*), dan rendah (*Low Income Countries*).

Dalam penelitian Sarma (2012) menyatakan bahwa pengembangan inisiatif inklusi keuangan membutuhkan penilaian kinerja yang dikenal sebagai *Index of Financial Inclusion* (juga dikenal sebagai IFI). *Index of Financial Inclusion* menggabungkan dimensi penetrasi, akses, serta pemanfaatan inklusi keuangan guna mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai negara mengukur kemajuan ekonomi yang terkait dengan perkembangan *Index of Financial Inclusion* dari waktu ke waktu. Aspek utama yang diperhitungkan merupakan penetrasi perbankan, yang diwakili oleh jumlah orang yang menggunakan layanan perbankan. Penetrasi perbankan adalah pertanda kunci pada indeks inklusi keuangan. Jumlah rekening simpanan di bank umum per 1.000 populasi adalah indikator yang menunjukkan dimensi ini. Dimensi kedua adalah ketersediaan akses ke layanan perbankan, mencerminkan sejauh mana perbankan dapat dijangkau oleh masyarakat untuk masyarakat. Indikator ketersediaan ini menghitung kantor bank komersial serta ATM per 100.000

populasi. Penggunaan layanan perbankan adalah dimensi ketiga. Dimensi ini menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari layanan perbankan. Contohnya jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial (% terhadap PDB).

Pada penelitian ini menggunakan indikator inklusi keuangan yaitu jumlah rekening deposito di bank umum per 1.000 populasi, total ATM per 100.000 populasi serta total kredit dimana diperlihatkan pada bank komersil (% terhadap PDB) dihitung dengan menggunakan *Index of financial inclusion*. Selain itu, terdapat juga variabel-variabel yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita serta kredit domestik yang diberikan kepada sektor swasta terhadap PDB.

Pada penelitian Demircuc-kunt *et al.*, (2016), ditemukan jika peningkatan inklusi keuangan bisa memperkuat pembagian deposito bank, dan semakin banyak pembagian aset pada masyarakat bisa membuat sistem keuangan lebih tahan terhadap tekanan. Permasalahan tersebut disebabkan nasabah yang memiliki nilai simpanan besar cenderung menarik simpanannya dari bank lebih cepat dibandingkan nasabah dengan nilai simpanan yang lebih rendah ketika terjadi guncangan. (Ratnovski dan Huang, 2010).

Indikator ATM dalam indeks inklusi keuangan merupakan pengukur kunci yang menunjukkan aksesibilitas layanan perbankan dasar bagi masyarakat, dengan mengacu pada jumlah mesin ATM per 100.000 orang dewasa. Penelitian oleh Demircuc-kunt *et al.*, (2016) dalam *Global Findex Database* menyoroti bahwa ketersediaan infrastruktur perbankan seperti ATM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang di mana cabang bank mungkin tidak tersebar secara merata. Lebih

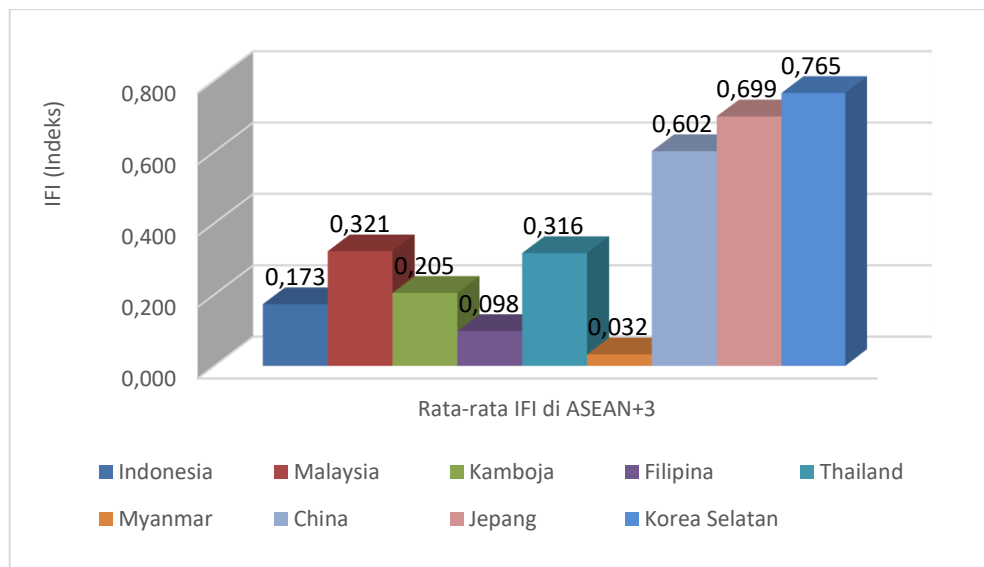
lanjut, studi oleh Berger *et al.*, (2009) menemukan korelasi positif antara jumlah ATM dan peningkatan inklusi keuangan, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah ATM dapat memperluas akses ke layanan keuangan formal, mengurangi kesenjangan keuangan, dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kedua studi ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam infrastruktur perbankan untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dimensi ketiga dari indeks inklusi keuangan adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank komersial kepada sektor swasta per 100.000 orang dewasa. Dimensi ini merupakan indikator penting yang mencerminkan akses dan ketersediaan pembiayaan formal bagi masyarakat dan bisnis. Kredit bank komersial memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena memberikan modal yang diperlukan untuk investasi, ekspansi usaha, dan konsumsi. Tingkat akses terhadap kredit ini seringkali dianggap sebagai salah satu pilar utama inklusi keuangan karena memungkinkan individu dan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka Berger *et al.*, (2009).

Demirguc-kunt *et al.*, (2016) menemukan bahwa akses terhadap kredit bank komersial berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan. Mereka menekankan bahwa sistem keuangan yang inklusif, yang mencakup akses luas terhadap kredit, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Berikut merupakan *Index of financial inclusion* berdasarkan berbagai indikator, terutama yang berkaitan dengan sektor perbankan seperti

ketersediaan, penggunaan, dan penetrasi perbankan. Indikator-indikator ini digabungkan menjadi sebuah indeks untuk sebuah negara dalam satu tahun.



Gambar 1. 3 Rata-rata IFI di ASEAN+3 tahun 2017-2021
Sumber : *World Bank* (2023)

Gambar diatas menampilkan rata-rata *Index of Financial Inclusion* (IFI) di beberapa negara ASEAN+3 untuk tahun 2017-2021. Korea Selatan menempati posisi tertinggi dengan nilai 0.765, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya memiliki akses yang baik ke layanan keuangan seperti perbankan, kredit, dan asuransi. China mengikuti dengan nilai 0.602, yang juga mencerminkan inklusi keuangan yang kuat berkat investasi besar dalam teknologi keuangan dan kebijakan pemerintah yang mendorong literasi keuangan.

Malaysia, dengan IFI 0.321, berada di posisi menengah dan menunjukkan upaya signifikan dalam memperluas akses keuangan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama di daerah pedesaan dan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Filipina dan Kamboja memiliki nilai IFI yang lebih rendah, masing-masing 0.296 dan 0.205, yang menunjukkan bahwa meskipun ada

kemajuan, banyak penduduk masih belum memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan dasar.

Negara Indonesia dan Myanmar berada di posisi terendah dengan nilai IFI masing-masing 0.173 dan 0.032. Ini mengindikasikan bahwa akses ke layanan keuangan di kedua negara tersebut masih sangat terbatas. Faktor-faktor seperti infrastruktur keuangan yang kurang berkembang, rendahnya literasi keuangan, dan kebijakan inklusi keuangan yang belum optimal menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara ini.

Guna meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN, dibentuk beberapa program unggulan untuk meminimalisir hambatan-hambatan serta meningkatkan akses masyarakat ke jasa-jasa keuangan. Sebagai contoh Indonesia memiliki strategi khusus untuk meningkatkan inklusi keuangan, antara lain melalui pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Tabungan- KU, *E-Money*, Telkomsel Cash, Program “Ke Bank”, dan peningkatan layanan microfinance. Contoh lain yaitu Thailand yang memiliki dua institusi khusus guna mencapai peningkatan inklusi keuangan yaitu *Village Fund* dan *Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BACC)* (Morgan, 2014).

Dibalik gencarnya penerapan program inklusi keuangan serta fakta-fakta penelitian mengenai dampak positif dan negatif inklusi keuangan terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan, ternyata inklusi keuangan juga dapat mengakibatkan dampak positif serta dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Dampak positifnya antara lain peningkatan diversifikasi aset perbankan, stabilitas basis tabungan, dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Namun, dampak negatif dapat muncul akibat inklusi keuangan yang

menurunkan standar kredit ketika lembaga keuangan mencoba menjangkau masyarakat unbankable dengan persyaratan pinjaman yang lebih longgar. Selain itu, risiko reputasi bank dapat meningkat karena beberapa negara menurunkan standar pendirian lembaga keuangan di pedesaan, serta regulasi yang tidak matang dari lembaga Microfinance dapat menyebabkan ketidakstabilan (Khan, 2011).

Program inklusi keuangan memiliki tujuan utama yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di berbagai negara. Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pembangunan sudah banyak diteliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarma & Pais, (2008) menggunakan metode OLS menyatakan bahwa tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki hubungan positif untuk beberapa negara di dunia.

Ghosh (2013) dimana penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, dan memungkinkan untuk terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya Sanjaya (2014) menggunakan model regresi serta metode data panel untuk mengestimasi hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia mendapatkan hasil dimana inklusi keuangan melalui program kredit mikro dapat meningkatkan status sosial maupun status ekonomi dari masyarakat miskin.

Pengaruh inklusi keuangan akan pembangunan dan kemiskinan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Karena terbatasnya jumlah data dan kurangnya pemahaman yang jelas dari proksi stabilitas sistem keuangan, hanya sedikit penelitian yang dilakukan tentang pengaruh inklusi keuangan akan stabilitas sistem keuangan. Pada penelitian sebelumnya, indikator Bank z-score (BZS) dan *Non-Performing Loan* (NPL) digunakan sebagai proksi stabilitas sistem keuangan. Menurut Morgan (2014), kedua proksi ini dapat digunakan untuk mengindikasikan stabilitas sistem keuangan. Pada penelitian Dienillah dan Anggraeni (2016), proksi yang mereka gunakan untuk stabilitas sistem keuangan adalah Bank z-score (BZS) dan skor perbandingan total kredit bank atau *Non-Performing Loan* (NPL). Dimana dalam penelitian ini penulis memanfaatkan Bank z-score guna indikator utama kestabilan sistem keuangan.

Dalam penelitian Awanti (2018) menyatakan korelasi antara non performing loan (NPL) dan Bank z-score (BZS) sebagai proksi dari stabilitas sistem keuangan dengan *Index of Financial Inclusion* (IFI) sebagai proksi dari inklusi keuangan menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas perbankan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan data yang digunakan adalah sampel keenam negara kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, menurut Iramayasari & Adry (2020), inklusi keuangan memiliki pengaruh positif serta signifikan akan stabilitas sistem keuangan.

Dilihat dari pentingnya Inklusi Keuangan dalam meningkatkan kestabilan keuangan pada penelitian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN+3.

Dikarenakan keterbatasan data yang diambil oleh peneliti negara ASEAN+3 dalam penelitian hanya mencakup negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, Jepang, China dan Korea. *Novelty* (kebaruan) pada penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan objek dalam penelitian dan perbedaan periode yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki *research gap* yang termasuk dalam kategori *theoretical gap*, yaitu kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang belum dijelaskan dengan teori yang relevan. Selain itu tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh variabel inklusi keuangan dalam menjaga kestabilan ekonomi di kawasan ASEAN+3. Dengan demikian, penulis akan meneliti hubungan korelasi antara Bank z-score untuk proksi stabilitas sistem keuangan menggunakan variabel indikator dari pengukuran *Index of Financial Inclusion* (IFI). *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang digunakan adalah jumlah rekening deposito bank komersial per 1.000 populasi, jumlah ATM per 100.000 populasi dan proporsi kredit bank komersial terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai proksi inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek lainnya yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Index of Financial Inclusion* (IFI) terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN+3 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, Jepang, China, Korea) tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Index of Financial Inclusion* (IFI) terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN+3 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, Jepang, China, Korea) tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan secara teoritis serta berguna untuk menambah ilmu khususnya mengenai inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman sehingga mengetahui variabel inklusi keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di ASEAN+3.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan pihak yang melakukan penelitian yang sejalan dengan literatur ini.
3. Bagi para penulis lain yang tertarik untuk menulis kajian ini mengenai inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan ASEAN+3, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.